

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi isu krusial nasional, meskipun angkanya menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasar pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023, persentase penduduk miskin Indonesia mencapai 9,36%, lebih rendah dibandingkan September 2022 (9,57%). Penurunan ini patut diapresiasi sebagai hasil dari berbagai upaya pemerintah, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. Namun, di balik angka-angka tersebut, masih terdapat kompleksitas dan tantangan dalam memerangi kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia berharap angka kemiskinan dapat turun menjadi 6-7%. Sesuai dengan sila yang termuat pada pembukaan UUD 1945 di mana menekankan tanggung jawab negara guna menjamin kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga negaranya, terhindar dari kemiskinan dan kemelaratan, maka permasalahan kemiskinan memang menjadi hal yang krusial untuk diatasi.

Permasalahan kemiskinan ini erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan lainnya seperti permasalahan gizi. Kemiskinan dilaporkan menjadi penyebab utama kekurangan gizi, kekurangan gizi pada usia dini dapat memperdalam pengaruh kemiskinan dan menjebak orang-orang yang kekurangan gizi ini ke dalam “siklus kemiskinan” yang berpotensi menimbulkan dampak kesehatan yang serius dan jangka panjang (Ord J, 2021). Banyaknya keluarga miskin di Indonesia mengakibatkan rendahnya daya beli untuk bahan makanan,

sehingga asupan gizi bagi balita tidak memadai dan menyebabkan masalah kekurangan gizi dan malnutrisi pada mereka. Pemenuhan gizi yang tepat sangatlah fundamental dalam mendorong tumbuh kembang balita.

Berdasarkan laporan Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, ada empat masalah gizi yang mempengaruhi anak balita di Indonesia, yaitu *stunting*, *overweight*, *underweight*, juga *wasting*. *Stunting* yang ditandai dengan tubuh pendek, menjadi salah satu isu gizi yang menjadi atensi serius oleh pihak pemerintah beserta khalayak umum. Kaitannya dengan itu, dikarenakan oleh tingginya prevalensi *stunting* nasional, yang diperkirakan mencapai 21,6% di periode 2022. Angka tersebut lebih tinggi dari standar WHO atau *World Health Organization* yang menetapkan batas dengan persentase 20%. Situasi inilah menegaskan bahwa, *stunting* masih menjadi masalah *urgent* di Indonesia yang membutuhkan upaya-upaya besar untuk penanganannya.

Pentingnya memantau pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi krusial dalam mendeteksi gejala kurang gizi yang berpotensi menyebabkan *stunting*. *Stunting* adalah suatu kondisi kurang gizi jangka panjang yang disebabkan oleh minimnya konsumsi gizi pada jangka waktu panjang, di mana biasanya dikarenakan ketidaksesuaian pola makan berdasarkan kebutuhan gizi. Faktor utama yang menjadi sebab *stunting* ialah kekurangan gizi yang berlangsung secara kronis. Kekurangan asupan gizi tersebut dapat dimulai dari bayi atau bahkan janin saat mengandung, ketika ibu hamil tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Selain itu, anak yang tidak mendapat cukup nutrisi selama proses pertumbuhan dan perkembangannya juga berisiko mengalami *stunting* (Bappenas, 2018).

Tantangan *stunting* dimulai selama periode kehamilan dan mungkin baru menjadi jelas ketika anak mencapai usia dua tahun. Dampak *stunting* biasanya terkait dengan kurangnya asupan gizi selama 1.000 hari pertama kehidupan anak, yang diawali sejak periode kehamilan sampai umur dua tahun anak. *Stunting* adalah kondisi yang dipicu oleh masalah malnutrisi kronis yang melibatkan ketidakcukupan nutrisi. *Stunting* dapat dialami dari periode kehamilan serta baru diketahui ketika anak mencapai usia dua tahun (Adriani, Prasanti dkk. 2022).

Stunting bisa mengakibatkan kematian pada bayi dan anak, serta meningkatkan risiko penyakit dan mengurangi kemampuan kognitif mereka. *Stunting* juga memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan otak anak, sehingga secara tidak langsung masalah *stunting* menjadi isu mendasar dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia karena dapat mempengaruhi daya saing individu. Selain itu, Kepala Bappenas menganggap *stunting* sebagai ancaman serius bagi perekonomian nasional dan bonus demografi 2030 (Bappenas, 2024). *Stunting* adalah masalah yang rumit dan memerlukan intervensi melalui pendekatan lintas sektor, termasuk intervensi dalam bidang sosial, ekonomi, ketahanan pangan, dan sebagainya.

Dengan adanya Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 mengenai Penurunan *Stunting*, pihak berwenang secara resmi menetapkan *stunting* sebagai salah satu program prioritas nasional. Selanjutnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merilis peraturan No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* (RANPASTI) Indonesia Tahun 2021-2024. RANPASTI merencanakan langkah-

langkah yang akan diambil oleh berbagai tingkatan pemerintah, termasuk pusat, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan, serta melibatkan berbagai pihak dalam upaya penanganan masalah *stunting*.

Upaya menekan dan mempercepat penurunan angka *stunting* di Kabupaten Pati, Bupati Pati Haryanto periode 2017-2022 berdasarkan SK Bupati Nomor 045.2/5297 Tahun 2022, membentuk dan mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) pada Juni 2022 yang terdiri dari yang terdiri atas Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala OPD, Camat, Organisasi Profesi, TP-PKK, ormas kerohanian, beserta akademisi. Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) ini berdasar pada mandat Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 dalam melaksanakan 5 pilar *stunting*. Tim diharapkan memiliki tingkat integritas yang tinggi melalui proses verifikasi dan validasi data mengenai *stunting*. Selain itu, mereka perlu mengembangkan peraturan yang mengatur peran serta desa dalam penanganan *stunting* karena masalah *stunting* secara utama berpusat di tingkat desa. Upaya lain yang diperlukan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk kader posyandu dan kader keluarga, serta memberikan perawatan khusus di daerah-daerah dengan tingkat prevalensi *stunting* yang tinggi. Selanjutnya, harus melakukan pemantauan dan evaluasi yang terkoordinasi dan terintegrasi. Adanya TPPS ini, juga diharapkan angka *stunting* di Kabupaten Pati semakin menurun.

Namun, setelah pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di Kabupaten Pati, angka *stunting* di kabupaten Pati cenderung masih tinggi tercatat dari data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) per Februari 2023, dari total 72 ribu sekian balita di Pati ada 4.185

mengalami hambatan pertumbuhan atau setara 5,71 persen. Permasalahan *stunting* di Kabupaten Pati masih menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pati. Pasalnya, kasus *stunting* di Pati masih ribuan hingga Juni 2023. Pada November 2023, Pj Gubernur Jawa Tengah (dalam Arif Febriyanto, 2023) menyatakan Kabupaten Pati menempati peringkat ke-15 jumlah perkara *stunting* tertinggi di Jawa Tengah. Sejak tahun 2020, angka *stunting* di Pati mengalami peningkatan.

Kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan respon pemerintah dalam mengatasi isu-isu masyarakat. *Collaborative Governance* adalah bentuk kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang melibatkan prosedur tertentu dalam penyusunan kebijakan serta peraturan yang berlaku di Indonesia (Arasti, 2021). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatasi berbagai tantangan di Indonesia dan menyediakan solusi yang lebih efisien juga efektif guna meraih tujuan sesuai apa yang dihendaki. Teori *Collaborative Governance* melibatkan berbagai pihak, termasuk individu, organisasi, dan lembaga, dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh Indonesia (Tilano & Suwitri, 2019). Akan tetapi, kerjasama yang terjalin harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, serta efektivitas, dan harus mempertimbangkan aspek sosial ekonomi yang berasal dari konsensus masyarakat serta memberikan perhatian khusus pada mereka yang menduduki posisi dimana lebih lemah terkait pengambilan keputusan. Pendekatan *Collaborative Governance* sangat penting dalam upaya mengatasi masalah *stunting* di Indonesia. Kerjasama antar pihak berwenang, sektor swasta, beserta masyarakat

memegang peranan kunci guna menangani isu *stunting* (Basyar & Puspaningtyas, 2022).

Berdasarkan laporan dari Bank Dunia mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) dan laporan *Business World* tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Peringkat Sumber Daya Manusia Indonesia

Aspek	Laporan	Peringkat Indonesia	Jumlah Negara	Peringkat Negara lain
Kualitas SDM	Bank Dunia	87	157	-
Daya Saing	<i>Business World</i>	45	63	• Singapura : 13 • Malaysia : 22

Sumber: Bank Dunia (2019); *Bussines World* (2019)

Tabel ini merangkum posisi Indonesia dalam dua laporan, sekaligus menyertakan perbandingan dengan negara-negara tetangga terkait daya saing. Peringkat ini menunjukkan posisi Indonesia di tengah-tengah dalam konteks global yang mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya meningkatkan daya saing ekonominya. Selain itu, perlu dicatat bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara pembangunan kualitas SDM dan isu-isu kesehatan, khususnya dalam konteks masalah *stunting* pada anak-anak. *Stunting* ialah perkara krusial di mana meningkatkan risiko penyakit dan kematian, obesitas, serta penyakit tidak menular di masa depan. Dampaknya juga termasuk terkendalanya perkembangan kognisi, rendahnya produktivitas, pun pendapatan yang sedikit, semua hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas SDM di masa mendatang. Ada banyak faktor yang dapat berkontribusi pada masalah *stunting*, termasuk pola makan dan aspek ekonomi, yang kemungkinan besar memiliki hubungan dengan isu kemiskinan, terutama dalam konteks *stunting* pada balita.

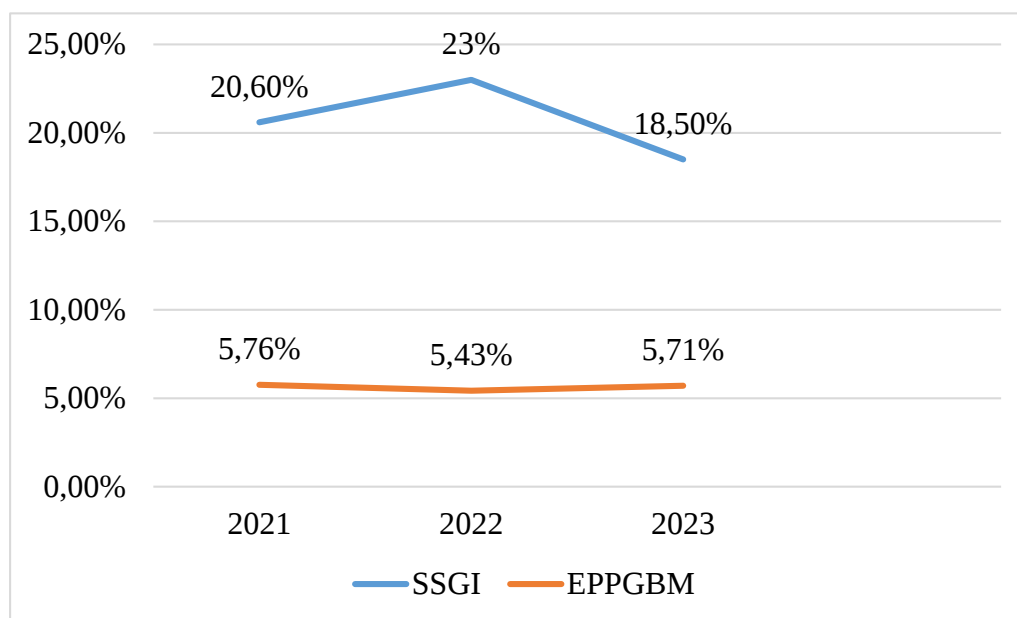
Stunting masih menjadi fokus utama di Jawa Tengah, dengan angka prevalensi mencapai 20,08% berdasarkan data nasional dari SSGI dan SUSENAS tahun 2022. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, lebih dari 20% balita yang tergolong pendek dan sangat pendek medapati gangguan kesehatan terkait *stunting*. Data dari Pemantauan Status Gizi Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi terendahnya yakni 10,4%, yang mengindikasikan bahwasanya masalah *stunting* juga kekurangan gizi kronis masih terdapat di semua kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Guna mengurangi total perkara *stunting* di 11 wilayah prioritas, yakni, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Batang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Tegal, Kabupaten Magelang dan Kota Pekalongan, tiap kabupaten/kota perlu melaksanakan usaha kolaboratif dalam menangani *stunting*.

Kabupaten Pati termasuk daerah prioritas *stunting* di Jawa Tengah atas prevalensi angka *stunting* pada tahun 2023 sebesar 18,5% menurut SSGI yang merupakan survei yang ditujukan sebagai alat evaluasi terhadap kemajuan intervensi gizi dan 5,71% menurut EPPGBM yaitu aplikasi untuk mencatat dan melaporkan hasil pengukuran status gizi yang dilakukan oleh kader. Berdasarkan data EPPGBM bahwa jumlah total balita di Kabupaten Pati sebanyak 78. 747 orang. Pada penimbangan bulan September 2023, jumlah balita yang melakukan pengukuran dan penimbangan sebanyak 72. 394 orang (91,9%). Setelah dilaksanakan kegiatan pengukuran tinggi badan atau panjang badan maka didapatkan 4.140 orang kasus balita *stunted* dengan prevalensi sebesar 5,71%.

Adapun rinciannya adalah 777 orang termasuk kategori balita sangat pendek dan 3.363 orang termasuk kategori balita pendek.

Sebelum adanya proses kolaborasi di Kabupaten Pati, kasus *stunting* bukan merupakan prioritas. Bahkan *stunting* belum terlalu dilihat, pemerintah berfokus ke gizi buruk saja, hanya sekedar data untuk jumlah balita pendek dan sangat pendek tanpa adanya intervensi. Proses *stunting* itu mulai dari sebelum balita pendek itu berat badannya berkurang, setelah itu menjadi kurus dan diidentifikasi menjadi gizi buruk, lalu menjadi *stunting*. Proses penanganan itu sebelum adanya proses kolaborasi sudah berjalan, untuk kegiatannya bukan penanganan *stunting* melainkan penanganan gizi.

Gambar 1.1 Prevalensi *Stunting* Kabupaten Pati



Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Pati, 2023.

Berdasarkan SK Bupati Pati tahun 2023 sebanyak 24 desa di Kabupaten Pati menjadi lokus penanganan *stunting*. Desa-desanya yang menjadi lokus itu yakni, Desa

Dumpil Kecamatan Dukuhseti, Desa Metaraman Kecamatan Margorejo, Desa Karangrejo Lor Kecamatan Jakenan, Desa Dukuhmulyo Kecamatan Jakenan, Desa Sidomulyo Kecamatan Gunungwungkal, Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti, Desa Wuwur Kecamatan Gabus, Desa Tondokerto Kecamatan Jakenan, Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo, Desa Langse Kecamatan Margorejo, Desa Margomulyo Kecamatan Tayu, Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti, Desa Sitirejo Kecamatan Tambakromo, Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal, Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu, Desa Sidoharjo Kecamatan Wedarijaksa, Desa Gabus Kecamatan Gabus, Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu, Desa Gadudero Kecamatan Sukolilo, Desa Brati Kecamatan Kayen, Desa Kepohkencono Kecamatan Pucakwangi, Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo, Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo, Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal. Kabupaten Pati memiliki 21 kecamatan dan 401 desa serta 5 kelurahan. Dari 21 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pati terdapat 9 kecamatan yang angka prevalensi *stunting* diatas rata-rata Kabupaten yaitu Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Jakenan, Margorejo, Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso, Gabus, dan Gunungwungkal. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan berbagai langkah untuk melakukan pencegahan dan menekan angka *stunting* di daerah tersebut. Berikut merupakan data prevalensi angka *stunting* di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Data ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kesehatan anak-anak di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Pati.

Tabel 1.2 *Stunting* tiap Kecamatan di Kabupaten Pati

No	Kecamatan	Puskesmas	<i>Stunting</i> 2021		<i>Stunting</i> 2022		<i>Stunting</i> 2023	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Sukolilo	Sukolilo I	401	16,7	131	4,8	202	7
2		Sukolilo II	133	6,1	75	3,7	44	1,7
3	Kayen	Kayen	85	2,8	40	1,3	129	3,3
4	Tambakromo	Tambakromo	163	7,2	97	4,4	164	6,8
5	Winong	Winong I	90	4,2	74	3,4	61	2,8
6		Winong II	50	3,5	47	3,6	37	2,4
7	Pucakwangi	Pucakwangi I	98	5,5	88	5,6	90	5,8
8		Pucakwangi II	31	3,7	101	9,1	49	4,5
9	Jaken	Jaken	71	3,1	87	3,3	77	2,9
10	Batangan	Batangan	82	3,2	82	3,1	105	3,9
11	Juwana	Juwana	80	1,5	54	1,0	60	1,2
12	Jakenan	Jakenan	232	10,9	271	11,7	298	11,5
13	Pati	Pati I	111	4,0	118	4,7	143	5,6
14		Pati II	21	0,8	35	1,4	50	1,8
15	Gabus	Gabus I	99	7,3	124	8,8	135	9,2
16		Gabus II	115	10,6	124	8,9	90	5,5
17	Margorejo	Margorejo	312	13,3	401	13,0	464	14,1
18	Gembong	Gembong	121	3,8	106	3,4	88	2,8
19	Tlogowungu	Tlogowungu	154	5,4	163	5,6	165	5,5
20	Wedarijaksa	Wedarijaksa I	100	4,4	125	5,1	205	8,8
21		Wedarijaksa II	123	7,7	161	10,0	147	8,9
22	Trangkil	Trangkil	126	3,6	126	3,5	171	5,2
23	Margoyoso	Margoyoso I	122	6,1	123	6,4	214	11,2
24		Margoyoso II	48	2,0	60	2,3	62	2,3
25	Gunungwungkal	Gunungwungkal	223	11,3	188	9,7	165	8
26	Cluwak	Cluwak	159	6,0	123	4,7	117	4,5
27	Tayu	Tayu I	204	9,2	240	12,6	237	10,5
28		Tayu II	51	3,4	53	3,2	61	3,7
29	Dukuhseti	Dukuhseti	320	9,1	361	10,9	355	12,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, 2023.

Berdasarkan data diatas, rata-rata prevalensi angka *stunting* di Kabupaten Pati masih tinggi. Kecamatan Margorejo menjadi kecamatan yang memiliki

prevalensi angka *stunting* tertinggi di tahun 2023. Dilihat dari tahun 2021-2023, prevalensi angka *stunting* di Kecamatan Margorejo mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 0,8%. Hal ini menandakan adanya masalah serius dalam kesehatan dan gizi anak-anak di Kecamatan Margorejo. Tingginya angka *stunting* di Kecamatan Margorejo menunjukkan bahwa diperlukan intervensi yang lebih efektif dari beragam pihak, tidak terkecuali pihak pemerintahan, institusi non-kepemerintahan, serta warga setempat. Program-program peningkatan gizi, penyuluhan kesehatan, dan perbaikan sanitasi harus menjadi prioritas untuk mengatasi masalah ini. Upaya kolaboratif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menurunkan angka *stunting* dan memastikan tumbuh kembang anak-anak di Kecamatan Margorejo lebih optimal di masa mendatang.

Berdasarkan data dari Puskesmas Margorejo dapat dilihat bahwa prevalensi angka *stunting* tertinggi pada tahun 2023 yaitu terletak di Desa Metaraman yaitu sebesar 18,97% dan desa tersebut merupakan desa lokus *stunting* tahun 2023 di Kabupaten Pati. Meskipun jumlah balita *stunting* di Desa Metaraman berjumlah 22 anak dan bukan merupakan angka tertinggi, namun apabila dilihat dari prevalensi angka *stunting* Desa Metaraman merupakan desa yang memiliki prevalensi tertinggi di tahun 2023. Persentase angka Desa Metaraman menjadi yang tertinggi dikarenakan pembanding atau jumlah anak yang diukur lebih sedikit dibandingkan dengan desa lain.

Tabel 1.3 *Stunting* tiap Desa di Kecamatan Margorejo

No	Desa/Kelurahan	2021		2022		2023	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Jambean Kidul	21	22,1	37	14,2	34	13,88
2	Wangunrejo	16	11,9	16	11,1	18	10,47
3	Bumirejo	17	11,6	20	10,2	46	17,56
4	Sokokulon	12	15,0	22	14,6	28	17,39
5	Jimbaran	15	18,3	14	13,6	16	15,24
6	Ngawen	7	10,4	17	13,0	19	15,32
7	Margorejo	17	8,3	30	13,5	30	12,45
8	Penambuhan	19	16,0	17	11,1	22	14,10
9	Langenharjo	17	13,5	19	13,6	16	11,11
10	Dadirejo	20	10,8	13	7,2	16	9,25
11	Sukoharjo	17	10,2	15	7,1	33	12,04
12	Badegan	6	8,1	11	12,0	9	10,47
13	Pegandan	24	18,3	27	16,0	32	16,33
14	Sukobubuk	34	23,4	25	14,4	33	17,46
15	Banyuurip	19	17,9	24	17,8	25	18,38
16	Langse	14	26,4	14	21,9	11	15,94
17	Metaraman	20	20,0	20	17,2	22	18,97
18	Muktiharjo	30	9,1	60	13,8	54	12,03

Sumber: Puskesmas Margorejo, 2023.

Pelaksanaan rapat konvergensi penurunan *stunting* tahun 2022 untuk program percepatan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Pati, Kepala Bappeda Kabupaten Pati (dalam Pemkab Pati, 2022), Ada lima variabel utama yang memerlukan perhatian khusus, yaitu verifikasi dan validasi data, fokus pada desa-desa yang menjadi lokus *stunting*, pembagian tugas yang jelas untuk OPD mengenai siapa yang bertanggung jawab atas apa, inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi, pemantauan dan evaluasi berkala, serta strategi komunikasi untuk mengubah perilaku. Di sisi lain, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati (2022) menegaskan bahwa penurunan angka *stunting* tidak hanya bergantung pada alat ukur dan teknik pengukuran tinggi badan balita. Ada faktor lain yang juga penting, seperti pola pengasuhan orang tua,

pola makan balita yang seimbang, akurasi input data, kebersihan sanitasi lingkungan, kualitas sumber daya manusia pendamping, serta infrastruktur yang memenuhi standar Kementerian Kesehatan.

Proses kolaborasi berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menekan angka *stunting* telah dilakukan dengan berbagai upaya dan program. Namun, masih ditemukan beberapa permasalahan, yaitu koordinasi antar OPD yang terkadang belum berjalan dengan baik, terkendala oleh kesibukan masing-masing OPD, serta peran beberapa OPD yang masih belum terlihat secara aktif. Dalam proses komunikasi, masih terjadi miskomunikasi antar OPD. Program “Basuh Stupa” yang dikemukakan oleh BAPPERIDA dengan pemberian PMT untuk balita *stunting* belum sepenuhnya efektif karena perbedaan dalam petunjuk teknis (juknis) yang diterapkan. Secara umum, penanganan *stunting* belum optimal karena dari pihak pusat masih mencari terobosan atau strategi baru yang diharapkan memiliki daya ungkit. Proses kolaborasi yang ada di Kabupaten Pati belum mampu menekan angka *stunting* sesuai target menjadi 14% (Dinas Kesehatan, 2024).

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“*Collaborative Governance* dalam Upaya Penanggulangan Prevalensi Angka *Stunting* di Desa Metaraman, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai atas uraian latar belakang masalah sebelumnya, dirumuskan masalah pada penelitian, meliputi:

1. Bagaimana proses kolaboratif antar lembaga dalam upaya penanggulangan prevalensi angka *stunting* pada balita di Desa Metaraman, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat proses kolaboratif dalam upaya penanggulangan prevalensi angka *stunting* pada balita di Desa Metaraman, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian penulis, sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah di atas, adalah:

1. Menganalisis proses kolaborasi antara kelembagaan yang terlibat pada upaya penanggulangan prevalensi angka *stunting* pada balita di Desa Metaraman, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.
2. Menganalisis faktor penghambat proses kolaboratif dalam upaya penanggulangan prevalensi angka *stunting* pada balita di Desa Metaraman, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kajian berikut diharap mampu memperluas pemahaman guna mengembangkan teori di bidang ilmu sosial dan politik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan data yang berkualitas sebagai referensi bagi penelitian perbandingan terkait penanganan prevalensi *stunting*. Diharapkan pula bahwa hasil penelitian ini dapat menginspirasi peneliti lain untuk melakukan studi

lanjutan di masa depan dengan tujuan memperbaiki dan mengembangkan temuan-temuan yang ada.

1.4.2 Manfaat Praktis

Di samping manfaat secara teoritis, peneliti berharap pada penelitiannya diharap mampu berkontribusi bagi:

1. Peneliti, pada penelitiannya mampu menjadi wadah dalam menerapkan kognisi yang telah dipelajari serta memperdalam pemahaman mengenai fenomena dan isu yang berkaitan dengan upaya penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Pati.
2. *Stakeholders* (pihak-pihak terkait), muatan penelitian berikut mampu dijadikan sumber inspirasi teruntuk mereka untuk aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan prevalensi angka *stunting*.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI/TAHUN/JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Ali Imron, Cleonara Yanuar Dini dkk, 2022.	Menguraikan peran kolaboratif antara berbagai sektor sosial dalam mempercepat penurunan kasus <i>stunting</i> di Kabupaten Nganjuk.	Pada penelitiannya, teori <i>collaborative governance</i> yang diterapkan yakni kerangka kerja yang diajukan oleh Ansell & Gash. Ansell (2012) secara lebih detail menjelaskan konsep <i>collaborative governance</i> atau tata kelola kolaboratif, termasuk indikator-indikator seperti pihak yang terlibat dalam kolaborasi, siapa yang mensponsori kerjasama, apa yang dimaksud dengan kerjasama, bagaimana kolaborasi diatur	Pada penelitiannya, menerapkan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara yang mengadopsi metode <i>Focus Group Discussion</i> (FGD). Proses analisis data dilakukan dengan menerapkan metode interaktif sesuai dengan pedoman yang diusulkan oleh Miles dan Huberman.	Penelitian ini mengungkapkan bahwa kerjasama antara berbagai pihak dalam kerangka pengelolaan kolaboratif terbukti efektif guna menurunkan angka <i>stunting</i> di Kabupaten Nganjuk. Pemerintah desa memiliki peran kunci guna merumuskan kebijakan fiskal dengan mengalokasikan dana desa untuk mendorong program ini. Bidan beserta kader KB juga berkolaborasi untuk merancang program yang efektif yang kemudian dibahas dalam sesi perencanaan pembangunan desa. Dukungan terus diberikan kepada keluarga yang menghadapi <i>stunting</i> atau berisiko mengalami <i>stunting</i> dengan peranan aktif bidan beserta Tim Pendamping Keluarga. Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh berbagai pihak

NO	PENELITI/TAHUN/ JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
					yang bekerja sama lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan <i>stunting</i> , yakni kurangnya pemahaman dan penerapan pola asuh anak oleh orang tua. Karenanya, untuk memperkuat pelaksanaan tata kelola kolaboratif guna mencapai tujuan penurunan <i>stunting</i> , sangat penting untuk mencapai pemahaman dan motivasi yang seragam di antara semua pihak yang terlibat. Selain itu, juga diperlukan peningkatan kapasitas kerjasama bersama dan inklusivitas peran agar tujuan bersama dapat dicapai lebih efektif.
2.	Ahmad Saufi, 2021.	Mengevaluasi serta menguraikan bagaimana <i>collaborative governance</i> dan program kebijakan di Provinsi Jawa Timur berperan dalam mengatasi masalah <i>stunting</i> .	Dalam penelitian ini, digunakan kerangka kerja teori <i>collaborative governance</i> yang dikemukakan oleh Emerson (2013), yang mencakup tiga aspek, Ini mencakup prinsip-prinsip partisipasi yang terdiri dari prinsip keterlibatan	Penelitian ini memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif, yang fokus pada jenis penelitian berbasis kepustakaan (<i>library research</i>).	Dalam upaya menanggulangi <i>stunting</i> di Provinsi Jawa Timur, dinamika <i>collaborative governance</i> masih menunjukkan adanya ketidakseimbangan. Hal ini diperlihatkan oleh temuan data yang menunjukkan dominasi peran pemerintah dan lambatnya proses transformasi kebijakan dari rencana aksi daerah. Untuk mengatasi

NO	PENELITI/TAHUN/ JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
			berdasarkan prinsip, motivasi yang sama, dan kemampuan untuk bertindak bersama-sama.		ketidakseimbangan ini, diperlukan peningkatan keterbukaan informasi serta upaya dari pemerintah sebagai pemain utama untuk membangun semangat kerjasama bersama dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat.
3.	Evalia Nuranita Putri, Herbasuki Nurcahyanto, 2021.	Penelitiannya memiliki tujuan guna mendalami dan menguraikan kerjasama yang terbentuk dalam upaya penanggulangan <i>stunting</i> di Desa Kalirandu, sambil mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat kolaborasi tersebut.	Penelitian ini mengadopsi teori <i>Collaborative Governance</i> sesuai dengan kerangka kerja yang didefinisikan oleh Ansell dan Gash (2007:550), yang mencakup aspek-aspek berikut: a. Kondisi Awal b. Rancangan Institusi c. Kepemimpinan yang Mendorong Kerjasama d. Proses Kolaboratif	Penelitiannya menerapkan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan guna memberikan penggambaran yang tepat tentang kolaborasi guna upaya menanggulangi <i>stunting</i> di Desa Kalirandu, yang berada di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.	Muatan penelitiannya memperlihatkan bahwasanya kolaborasi yang terjalin telah mencapai tingkat efektivitas yang cukup baik, yang tercermin dari adanya interaksi langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen pada tahapan, pemahaman bersama, juga pencapaian hasil sementara. Akan tetapi, masih ada sebagian faktor yang menghambat kolaborasi, terutama terkait dengan sumber daya manusia, seperti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat melalui kader <i>stunting</i> , dominasi sektor kesehatan dalam penanggulangan <i>stunting</i> di Desa Kalirandu, kurangnya komitmen

NO	PENELITI/TAHUN/ JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
					dari kepala desa, serta kasus dalam pengumpulan data. Di sisi lain, faktor yang mendukung kolaborasi tersebut antara lain mencakup sumber daya keuangan, saling ketergantungan antar pihak yang terlibat, pengalaman kerjasama sebelumnya, kejelasan peraturan dasar, dan tingkat transparansi pada kolaborasi.
4.	Qori Hidayasa, Fitri Kurnianingsih dkk, 2023.	Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana <i>Collaborative Governance</i> berjalan dalam upaya mempercepat penurunan kasus <i>stunting</i> di Kabupaten Bintan.	Penelitian ini menerapkan kerangka teori dari Ansell dan Gash (2007) yang membahas tahapan <i>Collaborative Governance</i> , yang meliputi: (1) Interaksi langsung dalam percakapan; (2) Pembangunan kepercayaan; (3) Komitmen terhadap tahapan proses; (4) Kesepahaman yang bersama-sama dicapai,	Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif bermetode deskriptif. Data dikumpul melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen.	Hasil penelitian ini adalah: (1) Dialog tatap muka dengan pemangku kepentingan; (2) Membangun Kepercayaan dibangun secara otomatis melalui rapat-rapat yang terkoordinasi. (3) pendekatan terhadap proses ditetapkan dan disatukan; (4) Meskipun terdapat kesamaan pemahaman, visi, misi, dan tujuan yang disepakati, namun masih terdapat perbedaan sikap mengenai tugas pokok dan fungsi tugas. (5) Meskipun kemajuan secara keseluruhan telah dicapai, masih

NO	PENELITI/TAHUN/ JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
			dan (5) Hasil-hasil interim yang tercapai.		ada sebagian daerah yang tingkat <i>stunting</i> nya tinggi.
5.	Nur Handayani, Riza Risyanti dkk, 2023.	Penelitiannya bertujuan guna memberi pemahaman ataupun deskripsi mengenai konsep “ <i>collaborative governance</i> ” dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Bangkalan, serta mengidentifikasi berbagai pihak yang bertanggung jawab pun strategi-strategi penanggulangan kemiskinan yang mana diterapkan di Bangkalan.	Penelitian ini menerapkan teori <i>Collaborative Governance</i> dengan menggunakan kerangka kerja model Ansell dan Gash (2007) yang melibatkan empat variabel kunci, yang mencakup (1) Keadaan awal (<i>Initial Condition</i>); (2) struktur institusi (<i>Institutional Structure</i>); (3) kepemimpinan yang memfasilitasi kerjasama (<i>Leadership that Facilitates Cooperation</i>), dan (4) tahapan proses kerjasama (<i>Stages of Collaborative Process</i>).	Penelitiannya menerapkan desain kualitatif bermetode deskriptif dimana peneliti mencoba memahami fenomena <i>collaborative governance</i> yang berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan	Temuan penelitiannya memperlihatkan bahwasanya “Tata Kelola Kolaboratif” pada upaya mengatasi kemiskinan di Bangkalan belum efektif, dilihat dari kondisi awal, desain kelembagaan, dukungan kepemimpinan, beserta proses kolaboratif yang ada, karena belum ada keseragaman dalam standar dan persepsi mengenai masyarakat miskin. Bupati sebagai pihak yang bertanggung jawab, bersama dengan pemangku kepentingan yang tergabung dalam TKPKD, mengacu pada kerangka politik yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menangani kemiskinan. Diperlukan kesatuan anggapan terkait standarisasi masyarakat miskin antara pemerintah pusat dan daerah, pun penyinkronan data mengenai masyarakat miskin

NO	PENELITI/TAHUN/ JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
					secara berkala untuk memastikan validitasnya.
6.	Heryono Susilo Utomo, Thalita Rifda Khaerani dkk, 2023	Untuk mengetahui bentuk-bentuk kolaborasi antar pemangku kepentingan yang diharapkan dapat menggambarkan atau menjelaskan dengan baik tentang kerjasama, intervensi penanganan <i>stunting</i> di Kabupaten Penajam Paser Utara	Penelitian ini menggunakan teori <i>collaborative governance</i> menurut Bryson dkk (2006). Terdapat unsur-unsur dalam kerjasama lintas sektoral yaitu situasi awal, elemen prosedur, kerangka organisasi dan pengelolaan, serta faktor-faktor tak terduga dan hambatan.	Metode penelitiannya bersifat kualitatif deskriptif. Proses pengumpulan datanya dimulai dari melakukan pengamatan, wawancara, pengumpulan dokumen, dan telaah literatur.	Berdasarkan hasil penelitian, program tersebut sejauh ini telah berjalan maksimal, meski belum melakukan perubahan besar dalam penanganannya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala dan kendala seperti ego lintas sektoral, anggaran yang tidak mencukupi.
7.	Anggara Setya Saputra, Denok Kurniasih, 2023.	Penelitiannya bertujuan guna meneliti bagaimanakah interaksi kerjasama yang terjadi antara pemerintah daerah, komunitas, dan	Penelitian ini menggunakan teori <i>Collaborative Governance</i> dari Chris Ansell dan Alison Gash. (2007). Chris Ansell dan Alison Gash memberikan gambaran model	Penelitian artikel ini mengintegrasikan metodologi deskriptif kualitatif. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbasis pada model	Hasil dari proses tata kelola kolaboratif ini mampu berjalan lancar. Oleh karena itu, pemerintah dapat menurunkan angka <i>stunting</i> secara bertahap dan mengembangkan model jaringan pendidikan kesehatan untuk mencegah dan mempercepat

NO	PENELITI/TAHUN/ JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
		sektor swasta dalam usaha bersama untuk mengatasi dan mengurangi tingkat <i>stunting</i> .	penerapan tata kelola kolaboratif yang mencakup aspek-aspek utama yang mencakup kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaboratif (<i>collaborative process</i>).	interaktif dengan desain eksplanatori (B. Miles et al., 2014; Creswell & Creswell, 2018). Metode triangulasi sumber data dan dokumen digunakan untuk menilai keabsahan data penelitian (B. Miles et al., 2014; Creswell & Creswell	penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Banyuma. Di dalamnya diuraikan kondisi awal proses tata kelola kolaboratif dengan mengkaji situasi dan kondisi <i>stunting</i> di Kabupaten Banyumas. Aspek kepemimpinan dan forum komunikasi jejaring di masyarakat mulai dari tingkat pemerintahan desa, tingkat kelurahan, dan tingkat kabupaten.
8.	Ane Permatasari, Nur Sofyan dkk, 2022.	Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi bagaimana praktik <i>Collaborative Governance</i> diterapkan di Kecamatan Berbah dalam rangka menghadapi permasalahan <i>stunting</i> .	Penelitian ini memanfaatkan kerangka teori <i>collaborative governance</i> menurut Emerson, yang menekankan tiga elemen dinamika kolaborasi, yaitu keterlibatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip, motivasi bersama, dan kemampuan untuk bertindak (Emerson et al., 2012).	Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis interaktif.	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa evaluasi pelaksanaan tata kelola kolaboratif diukur melalui aspek dinamika kerjasama, yang mencakup keterlibatan berbasis prinsip, motivasi bersama, dan kapasitas tindakan bersama, cenderung cukup baik. Namun, ada beberapa indikator yang belum berjalan secara memadai, seperti keberadaan forum komunikasi yang efektif di tingkat kecamatan yang masih belum terpenuhi,

NO	PENELITI/TAHUN/JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
					kurangnya partisipasi swasta dan perguruan tinggi, serta terbatasnya keterlibatan masyarakat. Tata kelola yang kolaboratif ini telah menghasilkan penurunan angka <i>stunting</i> dan masyarakat yang lebih terdidik. Menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah sangat disarankan untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih strategis, meningkatkan peran swasta dan perguruan tinggi, meningkatkan komitmen dan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengatasi <i>stunting</i>
9.	Leli Herlianti, 2022.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam program	Penelitian ini mengadopsi kerangka teori yang diperkenalkan oleh Ansell dan Gash, sebagaimana dijelaskan dalam studi yang dilakukan oleh Retno dan rekan-rekan (2021). Teori	Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan fokus pada aspek kualitatif. Data dikumpulkan melalui pengamatan dan	Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi antar aktor dalam jaringan dalam program pencegahan <i>stunting</i> di Kabupaten Bulukumba masih berjalan. Permasalahan <i>stunting</i> yang tinggi memerlukan aktor-aktor dalam

NO	PENELITI/TAHUN/ JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
		pencegahan <i>stunting</i> di Kabupaten Bulukumba.	ini mencakup unsur-unsur seperti percakapan langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses kolaboratif, pemahaman bersama, dan hasil bersama.	eksaminasi dokumen. Proses analisis data mengikuti pedoman yang diberikan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang melibatkan tiga tahap: merangkum data, menyajikan data, dan menyimpulkan atau memverifikasi hasil.	jaringan untuk berkolaborasi agar penurunan <i>stunting</i> dapat terlaksana. Kolaborasi antar aktor dalam jaringan melalui tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen proses kolaborasi, pemahaman umum dan hasil sementara dalam pencegahan <i>stunting</i> menggambarkan pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan publik.
10.	Tri Nur Azizah, Isna Fitria Agustina, 2023.	Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi kontribusi Desa Sukodono di Kabupaten Sidoarjo dalam menurunkan angka <i>stunting</i> sebagai langkah menuju pencapaian target SDGs.	Dasar teori yang digunakan adalah teori Yeti Heryati (2014) mengenai peran pemerintah yang terdiri dari empat indikator. Yaitu Tersedia Fasilitas dan Infrastruktur, Dana yang Tersedia, Kolaborasi, dan Partisipasi Warga.	Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dalam metodenya, dengan pengumpulan data yang melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dalam pemilihan metode <i>purposive sampling</i> dengan memilih informan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Sukodono pertama adalah ketersediaan sarana dan prasarana dimana pemerintah desa berupaya menyediakan alat Posyandu. Yang kedua adalah tersedianya anggaran dimana pemerintah Desa Sukodono mengalokasikan sebesar Rp. 108.612.800 yang digunakan untuk pembelian sarana dan prasarana program penurunan <i>stunting</i> . Ketiga kerjasama tersebut dimana terdapat tiga pihak yang berperan

NO	PENELITI/TAHUN/ JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
				yang dianggap memahami topik permasalahan yang diangkat.	yaitu Pemerintah Desa yang bertugas memberikan fasilitas dalam melaksanakan program penurunan <i>stunting</i> , Petugas Kesehatan yang bertugas memberikan layanan gizi dan Rumah Sakit Umum Daerah yang bertugas melakukan sosialisasi. Kepada masyarakat tentang program <i>stunting</i> .
11.	Allya Tsamarah Yunifar, Bambang Kusbandrijo dkk, 2023.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan <i>Collaborative Governance</i> dalam konteks pelaksanaan Perwali No. 79 Tahun 2022 tentang upaya percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kota Surabaya, serta untuk mengidentifikasi	Dalam penelitian ini, kerangka teori yang diterapkan adalah teori <i>Collaborative Governance</i> oleh Ansell dan Gash (2008). Model <i>Collaborative Governance</i> menurut pandangan Ansell dan Gash terdiri dari komponen-komponen berikut: kondisi awal, rancangan institusi, kepemimpinan, dan proses kolaboratif.	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memanfaatkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa kerjasama yang terbentuk antara Pemerintah, sektor Swasta, Media Massa, LSM, dan Akademisi sudah terjalin dengan baik. Selain itu, hasil dari kolaborasi ini juga terlihat positif, karena angka prevalensi <i>stunting</i> terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun, salah satu kendala dalam upaya penanggulangan <i>stunting</i> adalah tingkat mobilitas penduduk yang sangat tinggi di Kota Surabaya.

NO	PENELITI/TAHUN/ JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
		faktor-faktor yang mempengaruhi baik yang menghambat maupun yang mendukung <i>Collaborative Governance</i> dalam pelaksanaan Perwali tersebut.			
12.	Mutia Afrida, Nofriadi dkk, 2022.	Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana implementasi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Kelompok Koordinasi untuk Mempercepat Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam konteks tata kelola berkolaborasi, serta	Penelitian ini menggunakan kerangka teori <i>collaborative governance</i> yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash, yang mencakup komponen-komponen seperti situasi awal (<i>initial conditions</i>), struktur institusi (<i>institutional design</i>), kepemimpinan yang memfasilitasi kerjasama (<i>facilitative leadership</i>), tahapan proses kerjasama (<i>collaboration process</i>),	Metode yang digunakan yaitu kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip <i>collaborative governance</i> belum sepenuhnya diimplementasikan secara efisien dalam kolaborasi penanggulangan kemiskinan di Aceh. Salah satu indikasinya adalah ketidakseimbangan dalam pembagian wewenang selama proses kolaborasi, yang masih cenderung dikuasai oleh pihak pemerintah. Selain itu, belum ada kebijakan inovatif yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh sebagai pemimpin untuk memfasilitasi dan mengawasi kolaborasi secara menyeluruh.

NO	PENELITI/TAHUN/ JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
		mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.	dan hasil yang diperoleh (<i>outcomes</i>).		Dalam perjalanan kerjasama ini, sejumlah pencapaian yang berhasil dicapai termasuk implementasi program penanggulangan kemiskinan yang berlandaskan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta partisipasi aktif berbagai pihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Namun, ada kendala-kendala yang diidentifikasi, seperti kurangnya pembaruan data DTKS dan kurangnya sinergi antara pemerintah dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Rekomendasi yang diajukan adalah agar Gubernur Aceh, mengambil langkah-langkah aktif seperti menerbitkan kebijakan inovatif yang berkaitan dengan partisipasi pihak eksternal dalam seluruh proses kolaborasi.

Perbedaan penelitian “*Collaborative Governance* pada Upaya Penanggulangan Prevalensi Angka *Stunting* di Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati” Penelitian sebelumnya dilakukan untuk memberikan klarifikasi bahwa penelitian ini tidak meniru penelitian yang telah ada. Berikut adalah beberapa perbedaan antar penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yang tercantum dalam jurnal.

Penelitian pertama dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ali Imron, Cleonara Yanuar Dini, dkk (2022) dengan judul “Sinergitas Lintas Sektor dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur”. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan mengambil aktor lintas sektor. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa peran aktor dalam tata kelola kolaboratif cukup efektif untuk penurunan *stunting* di Kabupaten Nganjuk. Berbagai aktor fokus dan tugasnya masing-masing sehingga sinergitas tersebut dapat dilakukan dengan baik meskipun masih terdapat kendala seperti perilaku orang tua tentang pola asuh anak yang masih lemah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dijalankan peneliti ada pada lokus penelitiannya. Kontribusi penelitian sebelumnya dengan penelitian yang hendak dilaksanakan yaitu sebagai literatur untuk membuat kajian teori.

Penelitian kedua dari penelitian terdahulu ditulis oleh Ahmad Saufi (2021) dengan judul penelitian “Dinamika *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan *Stunting* ditengah Pandemi Covid-19”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dalam upaya menanggulangi *stunting* di

Provinsi Jawa Timur, dinamika *collaborative governance* masih menunjukkan adanya ketidakseimbangan. Hal ini diperlihatkan oleh temuan data yang menunjukkan dominasi peran pemerintah dan lambatnya proses transformasi kebijakan dari rencana aksi daerah. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, diperlukan peningkatan keterbukaan informasi serta upaya dari pemerintah sebagai pemain utama untuk membangun semangat kerjasama bersama dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu terdapat pada lokus penelitian dan model *collaborative governance* yang digunakan. Kontribusi penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai gambaran umum pelaksanaan penelitian.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Evalia Nuranita Putri dan Herbasuki Nurcahyanto berjudul “Collaborative Governance dalam Penanggulangan *Stunting* di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuh informan sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin telah mencapai tingkat efektivitas yang baik, ditandai dengan interaksi langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil sementara. Namun, ada beberapa faktor yang menghambat kolaborasi, seperti rendahnya partisipasi masyarakat melalui kader *stunting*, dominasi sektor kesehatan dalam penanganan *stunting* di Desa Kalirandu, kurangnya komitmen kepala desa, dan masalah pengumpulan data. Faktor yang mendukung kolaborasi ini antara lain mencakup sumber daya keuangan, saling

ketergantungan antara aktor yang terlibat, sejarah kerjasama sebelumnya, kejelasan aturan dasar, dan tingkat transparansi dalam kolaborasi. Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokus penelitian. Kontribusi dari penelitian terdahulu adalah sebagai referensi dalam pengembangan kajian teori untuk penelitian yang akan dilaksanakan.

Penelitian keempat dari penelitian sebelumnya ditulis oleh Qori Hidayasa, Fitri Kurnianingsih dan Agus Hendrayady (2023) dengan judul penelitian “Tata Kelola Kolaboratif dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bintan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Terlaksana dialog personal antar pemangku kepentingan. (2) Pembangunan kepercayaan terjadi secara otomatis dan melalui rapat koordinasi; (3) Komitmen terhadap proses ditetapkan dan konsisten; (4) Kesamaan pemahaman, visi, misi dan tujuan telah disepakati, namun perbedaan persepsi mengenai tugas pokok dan fungsi tugas masih ada. (5) Secara keseluruhan sudah ada hasil yang dicapai, namun masih ada beberapa daerah yang memiliki angka *stunting* tinggi. Yang membedakan penelitian terdahulu dengan yang dilakukan adalah lokasi penelitian dan model *Collaborative Governance* yang digunakan. Kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian yang akan dilakukan merupakan referensi dalam melakukan penelitian.

Penelitian kelima dari penelitian terdahulu ditulis oleh Nur Handayani, Riza Risianti, dkk (2023) dengan judul penelitian “*Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori dari

“Ansell dan Gash (2007)”. Hasil studi menunjukkan bahwa “*collaborative governance*” tidak efektif dalam mengatasi kemiskinan di wilayah Bangkalan karena tidak adanya keseragaman standar dan persepsi terhadap masyarakat miskin dalam hal kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan yang mendukung dan proses kolaboratif. Bupati merupakan penanggung jawab dan pemangku kepentingan yang tergabung dalam TKPKD penanggulangan kemiskinan mengacu pada kerangka kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Dianggap perlu adanya kesatuan persepsi mengenai standar masyarakat miskin di tingkat pusat dan daerah dan sinkronisasi data masyarakat miskin secara berkala untuk menjamin validitasnya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokasi dan subjek penelitiannya. Kontribusi penelitian terdahulu ini terhadap penelitian yang dilakukan peneliti adalah dijadikan sebagai literatur dalam melakukan kajian teoritis.

Penelitian keenam dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Heryono Susilo Utomo, Thalita Rifda Khaerani, dan Yustisia Anzalna (2023) dengan judul penelitian “*Cross-Sector Collaboration in Intervention to Prevent and Reduce Stunting in Penajam Paser Utara District*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, program tersebut sejauh ini telah berjalan maksimal, meski belum melakukan perubahan besar dalam penanganannya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala seperti ego lintas sektoral, anggaran yang tidak mencukupi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan

penelitian yang akan dilaksanakan yaitu lokus penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sebagai literatur dalam melakukan penelitian.

Penelitian ketujuh dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Anggara Setya Saputra dan Denok Kurniasih (2023) dengan judul penelitian “*Collaborative Governance in Stunting Reduction: A Case Study in Banyumas District*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari proses tata kelola kolaboratif ini mampu berjalan lancar. Dengan demikian, secara progresif, pemerintah dapat mengurangi tingkat *stunting* dan merancang pola jaringan pendidikan kesehatan sebagai bagian dari upaya untuk mencegah dan mempercepat penurunan kasus *stunting* di Kabupaten Banyumas. Yang memuat kondisi awal dalam proses tata kelola kolaboratif dengan melihat situasi dan kondisi *stunting* di Kabupaten Banyumas. Aspek kepemimpinan dan forum komunikasi yang berjejaring di masyarakat mulai dari tingkat pemerintahan desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu lokus penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu untuk literatur dalam kajian teori.

Penelitian kedelapan dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ane Permatasari, Nur Sofyan, dan Bhakti Gusti Walinegoro (2022) dengan judul penelitian “*Stunting Prevention Through Colaborative Governance in the Berbah Sub-district, Sleman*”. Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis interaktif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa evaluasi pelaksanaan

tata kelola kolaboratif diukur melalui aspek dinamika kerjasama, yang mencakup keterlibatan berbasis prinsip, motivasi bersama, dan kapasitas tindakan bersama, cenderung cukup baik. Namun, ada beberapa indikator yang belum berjalan secara memadai, seperti keberadaan forum komunikasi yang efektif di tingkat kecamatan yang masih belum terpenuhi, kurangnya partisipasi swasta dan perguruan tinggi, serta terbatasnya keterlibatan masyarakat. Tata kelola yang kolaboratif ini telah menghasilkan penurunan angka *stunting* dan masyarakat yang lebih terdidik. Menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah sangat disarankan untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih strategis, meningkatkan peran swasta dan perguruan tinggi, meningkatkan komitmen dan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengatasi *stunting*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu lokus penelitian dan model *collaborative governance* yang digunakan. Kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu sebagai gambaran umum dalam melaksanakan penelitian.

Penelitian kesembilan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Leli Herlianti (2022) dengan judul penelitian “*Collaboration of Actors in the Network in Stunting Prevention Programs in Bulukumba District*”. Pendekatan yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan fokus pada aspek kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi antar aktor dalam jaringan dalam program pencegahan *stunting* di Kabupaten Bulukumba masih berjalan. Permasalahan *stunting* yang tinggi memerlukan aktor-aktor dalam jaringan untuk berkolaborasi agar penurunan *stunting* dapat terlaksana.

Kolaborasi antar aktor dalam jaringan melalui tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen proses kolaborasi, pemahaman umum dan hasil sementara dalam pencegahan *stunting* menggambarkan pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan publik. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu di lokus penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sebagai acuan dalam pembuatan penelitian.

Penelitian kesepuluh dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Tri Nur Azizah dan Isna Fitria Agustina (2023) dengan judul penelitian “*Village Role in Reducing Stunting as an Effort to Achieve the SDGs of Sukodono Village Sidoarjo District*”. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dalam metodenya, dengan pengumpulan data yang melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Sukodono pertama adalah ketersediaan sarana dan prasarana dimana pemerintah desa berupaya menyediakan alat Posyandu. Yang kedua adalah tersedianya anggaran dimana pemerintah Desa Sukodono mengalokasikan sebesar Rp. 108.612.800 yang digunakan untuk pembelian sarana dan prasarana program penurunan *stunting*. Ketiga kerjasama tersebut dimana terdapat tiga pihak yang berperan yaitu Pemerintah Desa yang bertugas memberikan fasilitas dalam melaksanakan program penurunan *stunting*, Petugas Kesehatan yang bertugas memberikan layanan gizi dan Rumah Sakit Umum Daerah yang bertugas melakukan sosialisasi. Kepada masyarakat tentang program *stunting*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu lokus penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sebagai referensi dalam metode penelitian.

Penelitian kesebelas dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Allya Tsamarah Yunifar, Bambang Kusbandrijo, dan Anggaeny Puspaningtyas (2023) dengan judul penelitian “*Collaborative Governance* pada Penerapan Perwali No 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Surabaya”. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa kerjasama yang terbentuk antara Pemerintah, sektor Swasta, Media Massa, LSM, dan Akademisi sudah terjalin dengan baik. Selain itu, hasil dari kolaborasi ini juga terlihat positif, karena angka prevalensi *stunting* terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun, salah satu kendala dalam upaya penanggulangan *stunting* adalah tingkat mobilitas penduduk yang sangat tinggi di Kota Surabaya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu lokus penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dijadikan sebagai literatur serta memberikan rekomendasi penelitian.

Penelitian kedua belas dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Mutia Afrida, Nofriadi, dan Mukhrijal (2022) dengan judul penelitian “Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Aceh dalam Pendekatan *Collaborative Governance* oleh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash. Mutia Afrida, Nofriadi dkk, 2022. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana implementasi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Kelompok Koordinasi untuk Mempercepat Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam konteks tata kelola berkolaborasi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini

menggunakan kerangka teori *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash, yang mencakup komponen-komponen seperti situasi awal (*initial conditions*), struktur institusi (*institutional design*), kepemimpinan yang memfasilitasi kerjasama (*facilitative leadership*), tahapan proses kerjasama (*collaboration process*), dan hasil yang diperoleh (*outcomes*). Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *collaborative governance* belum sepenuhnya diimplementasikan secara efisien dalam kolaborasi penanggulangan kemiskinan di Aceh. Salah satu indikasinya adalah ketidakseimbangan dalam pembagian wewenang selama proses kolaborasi, yang masih cenderung dikuasai oleh pihak pemerintah. Selain itu, belum ada kebijakan inovatif yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh sebagai pemimpin untuk memfasilitasi dan mengawasi kolaborasi secara menyeluruh. Dalam perjalanan kerjasama ini, sejumlah pencapaian yang berhasil dicapai termasuk implementasi program penanggulangan kemiskinan yang berlandaskan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta partisipasi aktif berbagai pihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Namun, ada kendala-kendala yang diidentifikasi, seperti kurangnya pembaruan data DTKS dan kurangnya sinergi antara pemerintah dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan adalah agar Gubernur Aceh, sebagai pemimpin, mengambil langkah-langkah aktif seperti menerbitkan kebijakan inovatif yang berkaitan dengan partisipasi pihak eksternal dalam seluruh proses kolaborasi. Selain itu, diharapkan pemimpin dapat memfasilitasi pengembangan program REGSOSEK dan membentuk tim khusus untuk pembaruan data tentang masyarakat

miskin di Provinsi Aceh. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu lokus penelitian. Kontribusi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu dijadikan sebagai literatur dalam pembuatan penelitian serta memberikan rekomendasi penelitian.

1.5.2 Kajian Teori

1.5.2.1 Administrasi Publik

Definisi administrasi publik oleh Chandler dan Plano (dalam Yeremias T. Keban, 2019) menggambarkan administrasi publik sebagai proses di mana sumber daya dan personel sektor publik diorganisir dan disesuaikan untuk merancang, melaksanakan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam konteks kebijakan pemerintah. Dalam kajian literatur oleh McCurdy (dalam Yeremias T. Keban, 2019), administrasi publik juga bisa diinterpretasikan sebagai suatu proses politik yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengatur sebuah negara, dan dapat dianggap sebagai pendekatan utama untuk menjalankan berbagai fungsi negara. Administrasi publik adalah usaha bersama oleh sekelompok individu atau organisasi untuk menjalankan aktivitas pemerintahan dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Buku ajar yang ditulis oleh Nicholas Henry (dalam Yeremias T. Keban, 2019) ini memberikan beberapa cakupan yang dapat diambil dari beberapa unsur berikut (selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri):

1. Organisasi publik terutama berkaitan dengan model organisasi dan perilaku birokrasi.

2. Manajemen publik, yang meliputi sistem manajemen dan ilmu pengetahuan, evaluasi dan produktivitas program, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia.
3. Implementasi, yang mencakup pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, tata kelola antar pemerintah, dan etika birokrasi.

Penelitian ini masuk ke dalam ranah manajemen publik karena secara mendalam membahas mengenai kolaborasi antar lembaga. Manajemen publik adalah bidang yang fokus pada pengelolaan organisasi dan kebijakan pemerintah serta interaksi antara berbagai lembaga publik. Dalam konteks ini, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kolaborasi antar lembaga dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan publik. Peneliti menganalisis berbagai model kolaborasi dan menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi, seperti komunikasi, koordinasi, dan kepercayaan antar lembaga.

1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah suatu cara pandang, nilai, metode, prinsip dasar, atau cara pemecahan suatu masalah yang dianut oleh komunitas ilmiah pada suatu waktu tertentu (Kuhn dalam Yeremias T. Keban, 2019). Dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu administrasi publik, anomali-anomali tersebut telah terjadi beberapa kali dan terlihat dari tergantinya cara pandang lama dengan cara pandang baru, seperti yang diungkapkan oleh Nicholas Henry (dalam Yeremias T. Keban, 2019). Mengenai pendapat mengenai paradigma pembangunan administrasi publik, sebagian ilmuwan sependapat. Nicholas Henry misalnya, beberapa kali merevisi

paradigma administrasi publik mulai tahun 1975, yang semula menyatakan ada empat paradigma pembangunan, namun akhirnya direvisi lagi sehingga diketahui ada enam paradigma pembangunan pelayanan publik. Administrasi (Henry, 2004). Pergeseran paradigme administrasi public menurut Henry adalah sebagai berikut :

1. Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Publikasi Frank J. Goodnow (1900) dan Leonard D. White (1926) adalah tanda periode ini. Goodnow mengklaim bahwa negara dan organorgannya memiliki dua peran, yaitu politik dan administrasi, dalam bukunya Politik dan Administrasi. Goodnow mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan sedang administrasi berfokus pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan tersebut.

2. Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Pada paradigma 2 ini memperlihatkan perkembangan yang sangat pesat dalam penelitian administrasi publik, pembentukan program administrasi publik di universitas dan perguruan tinggi, dan munculnya beberapa asosiasi profesional. Puncak administrasi publik terjadi pada masa ini. Antara tahun 1930 dan awal 1940, para pemikir administrasi publik memperoleh penerimaan tidak hanya di pemerintahan tetapi juga di industri. “Fokus” administrasi publik, atau pengetahuan mendasar berupa konsep-konsep administrasi, adalah topik utama dari paradigma 2. Prinsip-prinsip administrasi diyakini berlaku untuk semua pengaturan administrasi, termasuk perusahaan publik dan swasta, tanpa memperhatikan budaya perbedaan, lokasi administrasi publik tidak menjadi perhatian.

3. Ilmu Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Sebagai hasil dari kritik-kritik yang disebutkan sebelumnya, administrasi publik kembali ke akarnya dalam ilmu politik. Dampak dari pergerakan ini adalah revisi ulang definisi terkait dengan lokasi administrasi publik, yang sekarang lebih terfokus pada birokrasi pemerintah, sementara konsep terkait fokusnya diringankan. Masa ini dianggap sebagai upaya untuk secara kritis mengevaluasi hubungan konseptual antara administrasi publik dan politik.

4. Ilmu Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma yang ke-4 ini terjadi hampir bersamaan dengan paradigma yang ke-3. Menurut paradigma 4 ini, dalam pengaturan manajemen umum, administrasi publik kehilangan karakter dan kekhasannya. Jurnal penting *Administrative Science Quarterly*, sebuah publikasi yang signifikan, didirikan pada tahun 1956 pada teori bahwa tidak benar untuk membedakan antara laba, nirlaba, dan administrasi publik.

5. Ilmu Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara

Fokus teori organisasi saat ini adalah tentang bagaimana dan mengapa organisasi berfungsi, mengapa individu bertindak seperti yang mereka lakukan, dan bagaimana dan mengapa pilihan dibuat. Oleh karena itu, teori organisasi dan ilmu manajemen lebih penting dalam administrasi negara saat ini. Kesejahteraan dan kepentingan publik adalah lokus dari paradigma ini.

6. *Governance*

Paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan adalah *governance*. Pemerintah, swasta, dan masyarakat merupakan tiga pilar dari paradigma ini. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan tunggal merupakan model penyelenggaraan pemerintahan yang telah muncul sebelumnya. Perspektif atau kerangka konseptual baru dalam administrasi publik, yang sering disebut sebagai tata kelola yang baik (*good governance*), muncul karena adanya perubahan dalam paradigma dari “pemerintah” (*government*) menjadi “tata kelola” (*governance*). Pendekatan ini menyoroti pentingnya kerja sama dan keselarasan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam usaha meratakan dan menjaga keseimbangan.

Penelitian ini masuk dalam paradigma ke enam, yaitu *governance* karena membahas mengenai proses *collaborative governance* antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Paradigma tata kelola melibatkan tiga pelaku utama, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, yang berperan kunci dalam proses pembangunan. Pemerintah kini semakin melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam inisiatif pembangunan. Dalam upaya memajukan negara-negara berkembang, langkah-langkah pembangunan mencakup penyatuan perspektif dan program pembangunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kolaborasi adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang terjadi selama proses penggabungan ide dan upaya oleh pihak-pihak tertentu.

1.5.2.3 Manajemen Publik

Manajemen publik adalah salah satu bidang ilmu yang berasal dari ranah administrasi publik. Bidang ini membahas berbagai aspek, termasuk restrukturisasi

organisasi, perencanaan anggaran, pengelolaan sumber daya, dan penilaian program. Pemahaman tentang manajemen publik sangatlah tergantung kepada keadaan beserta lingkungan kontekstual, yang harus dipertimbangkan untuk menjalankannya secara efektif. Pada dasarnya, manajemen publik, yang juga dikenal sebagai manajemen pemerintah, merupakan upaya dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan infrastruktur dan sumber daya yang tersedia. Elemen-elemen manajemen saat ini memiliki signifikansi yang besar dalam menjalankan fungsi organisasi, pada bidang swasta atau sektor publik seperti pemerintahan. Perlu ditekankan bahwa, meskipun prinsip-prinsip manajemen yang digunakan dalam sektor publik bisa dipengaruhi oleh prinsip-prinsip manajemen sektor swasta, hal ini tidak mengubah sifat dan tujuan organisasi sektor publik agar serupa dengan sektor swasta (Wijaya, A. F., & Danar, O. R. 2014).

1.5.2.4 Collaborative Governance

Gagasan tentang tata kelola atau administrasi kolaboratif merupakan salah satu cara di mana konsep manajemen atau tata kelola pemerintahan diungkapkan. Ide ini menekankan signifikansi situasi di mana aktor-aktor dari sektor publik dan swasta (bisnis) bekerja sama dalam cara tertentu untuk menghasilkan produk-produk hukum, undang-undang, dan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan umum. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks tata kelola pemerintahan, aktor-aktor publik seperti pemerintah dan aktor-aktor swasta seperti kelompok usaha atau perusahaan, tidak beroperasi secara terpisah dan mandiri. Sebaliknya, mereka berkolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi

dijelaskan sebagai bentuk kerja sama antara individu, kelompok, atau organisasi guna meraih capaian yang tidak dapat diwujudkan ataupun diimplementasi mandiri.

Menurut Edward DeSeve (dalam Sudarmo, 2015) pengertian *collaborative governance* ialah suatu sistem terpadu di mana melibatkan keterkaitan yang diatur di luar batas-batas organisasi, baik itu yang memiliki struktur formal maupun yang bersifat informal. Sistem ini juga melibatkan prinsip-prinsip organisasi yang berubah pun memiliki definisi secara lugas tentang pencapaian kesuksesan. Menurut bukunya yang berjudul “*Creating Public Value Using Managed Networks*” DeSeve mengidentifikasi delapan faktor utama yang mampu digunakan guna mengukur kesuksesan suatu jaringan ataupun kolaborasi di konteks pemerintahan, termasuk:

1. *Network structure* (struktur jaringan) menggambarkan secara konseptual bagaimana elemen-elemen yang berbeda saling terhubung dan berkolaborasi, membentuk suatu kesatuan yang mencerminkan hubungan di antara mereka.
2. *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan bersama) merujuk atas kesepakatan untuk berkomitmen pada tujuan yang sama. Ini berarti bahwa anggota jaringan memiliki motivasi dan tekad yang serupa untuk mencapai tujuan positif yang bersamaan.
3. Kepercayaan di antara peserta dilandaskan kepada keterkaitan profesional ataupun sosial, yang berarti rasa yakin bahwasanya mereka memiliki kepercayaan satu sama lain dalam berbagi informasi ataupun bekerja sama dengan pihak lainnya dalam jaringan guna meraih capaian bersama.
4. Tata kelola (*governance clarity*) dalam konteks ini merujuk pada:

- a. *Boundary dan exclusivity* (batasan dan eksklusivitas) yang menentukan siapa yang menjadi anggota dalam jaringan atau kolaborasi dan siapa yang tidak termasuk.
 - b. *Rules* (aturan-aturan) mengatur perilaku anggota dengan mengancam tindakan pengeluaran bila perilaku mereka tidak sejalan ataupun melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Terdapat kebijakan secara jelas mengenai tindakan yang diizinkan beserta sebaliknya.
 - c. *Self determination* (prinsip penentuan sendiri) adalah hak untuk menentukan cara pengelolaan jaringan atau kolaborasi serta siapa yang memiliki wewenang untuk mengelolanya.
 - d. *Network management* (pengelolaan jaringan) berkaitan dengan penyelesaian konflik, pembagian sumber daya, pengawasan mutu, pun pemeliharaan organisasi. Selain itu, tersedia sumber daya manusia dengan kompetensi yang memenuhi persyaratan, juga terdapat dukungan finansial yang cukup untuk menjaga keberlanjutan.
5. *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan) mengindikasikan ketersediaan prosedur dan standar yang terdefinisi dengan baik yang telah diterima secara luas untuk menilai berbagai aspek.
6. *Distributive accountability* (pembagian akuntabilitas/responsibilitas) mencakup berbagai tindakan pengelolaan beserta pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh anggota jaringan atau kolaborasi.

7. Berbagi informasi melibatkan memberikan akses yang sederhana kepada anggota, melindungi privasi individu, dan mengatur akses untuk mereka yang non anggota dengan syarat persetujuan dari seluruh pihak.
8. Akses ke sumber daya mengacu pada ketersediaan berbagai jenis sumber daya seperti keuangan, teknis, tenaga kerja, dan sumber daya lain yang dibutuhkan.

Adapun konsep yang digunakan pejabat pemerintahan untuk melibatkan pemangku kepentingan non-negara adalah berkaitan langsung dengan proses pengambilan kebijakan formal dengan menggunakan cara konsensus dan musyawarah untuk menuntaskan kasus-kasus yang timbul pada sebuah negara dan melaksanakan kebijakan dengan tujuan. Menurut Ansell dan Gash (dalam Sunu, 2020) teori *Collaborative Governance* adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan pemerintah, berbagai entitas publik, organisasi non-pemerintah, juga masyarakat, baik secara maupun tidak dengan tujuan mengatasi masalah-masalah masyarakat.

1. Kondisi Awal

Mengacu pada tahap di mana para pemangku kepentingan memahami dan berbagi visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai, sehingga kolaborasi dapat terbentuk dengan baik dan sejalan atas tahapan kerja yang diperlukan untuk menuntaskan kasus terkait.

2. Desain Kelembagaan

Pemimpin mengundang para pemangku kepentingan guna terlibat dalam negosiasi pada kasus-kasus itu. Dalam konteks *Collaborative Governance*, fokusnya adalah pada upaya mencapai konsensus, meskipun

hasilnya tidak selalu pasti. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua kolaborasi memerlukan pencapaian konsensus. Desain lembaga dalam kolaborasi menekankan pada peraturan dan prosedur yang mengatur proses secara transparan dengan tujuan menjalin kerjasama positif antara pihak pemangku kepentingan dengan pemimpin.

3. Kepemimpinan

Memiliki peran penting pada tahap kolaborasi guna manajemen negosiasi pada penyelesaian permasalahan yang muncul. Permasalahan sering kali muncul akibat kurangnya kesesuaian dalam kepemimpinan, namun hal ini dapat diperbaiki melalui musyawarah, pembangunan kepercayaan, pembentukan aturan dasar yang lugas, serta alokasi manfaat bersama.

4. Proses Kolaboratif

Proses kolaboratif adalah elemen kunci dalam model *Collaborative Governance*. Proses ini berfokus pada pengembangan saling percaya dan komitmen antar pihak yang bersangkutan pada perencanaan kolaboratif. Melalui kolaborasi, tercipta visi dan misi yang lugas, beserta pemahaman bersama guna melaksanakan tahap perencanaan kolaboratif terkait. Menurut teori ini, proses kolaboratif terdiri dari :

a. Dialog tatap muka (*face to face dialogue*)

Keseluruhan tata kelola kolaboratif dibentuk berlandaskan “dialog antar pihak pemangku kepentingan”. Dialog tersebut berfungsi sebagaimana sebuah tahap dengan tujuan mencapai konsensus atau kesepakatan. Biasanya, dialog antara pemangku kepentingan dijalankan

guna mengidentifikasi kesempatan yang memfokuskan narasi bahwasanya kolaborasi mampu menghasilkan situasi “saling memberi untung” bagi semua pihak yang terlibat.

b. Membangun kepercayaan (*trust building*)

Merupakan bagian tak terpisahkan dari tahap dialog. Para pemimpin kolaborasi perlu memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan antar pihak pemangku kepentingan. Tahap ini memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan komitmen yang kuat.

c. Komitmen dalam proses kolaborasi (*commitment to process*)

Keadaan saling bergantung yang tinggi antar pihak pemangku kepentingan cenderung memberi peningkatan atas komitmennya dalam kolaborasi. Penting untuk diingat bahwa kolaborasi bukanlah kesepakatan sekali saja, melainkan proses kerja sama secara berkelanjutan sekaligus saling memberi untung.

d. Pemahaman bersama (*share understanding*)

Di suatu titik, pihak-pihak pemangku kepentingan perlu mengembangkan pemahaman bersama terkait hal-hal yang ingin diwujudkan. Pemahaman tersebut mencakup tujuan bersama secara lugas, pendefinisian masalah yang alami secara kolektif, serta nilai-nilai yang hendak diwujudkan melalui kolaborasi.

e. Hasil antara (*intermediate outcomes*)

Kolaborasi lebih mungkin berlanjut saat hasil dari manfaat beserta tujuan berkolaborasi mampu dirasa secara nyata, meskipun masih kecil,

sebagaimana hasil sementara di tahap tersebut. Hasil kecil (*small win*) mampu dijadikan pendukung pada usaha membangun komitmen sekaligus kepercayaan bersama di antara pihak pemangku kepentingan.

Dalam model yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dalam teori *Collaborative Governance*, terdapat penekanan pada pencapaian efektivitas dalam kolaborasi antara pemerintah, *stakeholders*, dan masyarakat pada upaya mengentaskan kasus-kasus yang ada. Pencapaian efektivitas ini dicapai melalui pembangunan kerjasama yang kuat, kepercayaan timbal balik, serta pengembangan visi dan misi yang terdefinisi dengan jelas.

Menurut *Government of Canada* tahun 2008 (dalam Sudarmo, 2011) terhambatnya kemajuan kolaborasi (serta partisipasi) dikarenakan sejumlah faktor, utamanya budaya, institusi, beserta politik:

1. Faktor budaya

Terhadap aspek budaya, kolaborasi dapat mengalami kegagalan sebab terdapatnya kecenderungan budaya yang menekankan ketergantungan kepada pedoman, takut mengambil inovasi maupun risiko. Terlalu mengikuti prosedur secara berlebihan dapat menghambat kemajuan dalam meningkatkan kualitas kolaborasi. Selain itu, kolaborasi bisa mengalami kegagalan ketika pemerintah tetap menerapkan pendekatan “*top down*” dalam berkolaborasi dengan pihak lainnya, masih ada dominasi dari pemerintah, dan kesepakatan tidak dijalankan dengan semangat kerjasama dan kesetaraan yang diperlukan untuk kolaborasi yang sukses. Selain itu, partisipasi dari kelompok kepentingan ataupun

pemangku kepentingan lain kerap diabaikan dan dianggap tidak penting, yang juga dapat menyebabkan kegagalan dalam kolaborasi.

2. Faktor institusi

Kolaborasi bisa mengalami kegagalan karena lembaga-lembaga bersangkutan, utamanya pihak pemerintah, sering kali relatif mengimplementasi struktur hirarkis pada lembaga-lembaga lain yang turut berpartisipasi dalam kolaborasi tersebut. Lembaga-lembaga yang masih mempertahankan struktur vertikal ini menjadikan akuntabilitas lembaga serta arah kebijakan sifatnya vertikal, dan ketidaksesuaian dengan karakteristik kolaborasi yang mengharuskan kerja dan organisasi dalam bentuk horizontal antar pemerintahan dan non-pemerintahan. Akuntabilitas lembaga publik (organisasi yang berafiliasi dengan pemerintah) relatif bersifat kaku, merujuk pada akuntabilitas terhadap atasan atau peraturan saja, jadi penekanan pada konteks tersebut lebih kepada tanggung jawabnya.

3. Faktor politik

Kegagalan dalam kolaborasi dapat disebabkan oleh minimnya inovasi dari pemimpin guna meraih tujuan politik yang bersifat kompleks dan seringkali saling bertentangan. Kepemimpinan yang inovatif ialah kepemimpinan yang mampu mengenalkan ragam tujuan dan nilai di mana mampu menjadi dasar bagi pemerintahan yang berkolaborasi, memberi inspirasi kepada agenda yang ditetapkan, sambil konsisten mengarahkan pencapaian hasil positif. Ini menggaris bawahkan bahwanya kolaborasi dapat terkendala bila para pemimpin dari kelompok-kelompok yang berkolaborasi

minim ataupun tidak memiliki inovasi dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks pun memiliki potensi untuk memicu konflik di antara mereka.

Berdasarkan teori *collaborative governance* yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan *collaborative governance* adalah situasi pemerintah bekerjasama dengan organisasi dan individu lain guna mencapai tujuan publik. Penelitian ini akan mendasarkan pada kerangka teori *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash karena memiliki fenomena yang sesuai dengan penelitian ini yang membahas mengenai tahap kolaborasi guna upaya menanggulangi prevalensi angka *stunting* di Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Dalam teori tersebut dijelaskan mulai dari dialog tatap muka hingga hasil antara dan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan kolaborasi tersebut.

1.5.2.5 *Stunting*

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). *Stunting* mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak *stunting* juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, *stunting* dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya (Wirawan, Susilo 2022).

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang dihadapi oleh negara berkembang. Indonesia memiliki target penurunan 14% pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan mengikuti target yang ditetapkan oleh WHO yaitu sebesar 14% pada tahun 2024 (Siswati, 2022). *Stunting* adalah bentuk paling umum

dari anak-anak gizi buruk di dunia, dan dialami oleh 161 juta anak berusia 0-5 tahun. *Stunting* telah terbukti berhubungan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas anak, penurunan fungsi kognitif, dan peningkatan risiko penyakit kronis di masa dewasa. WHO sebagai organisasi badan kesehatan dunia juga telah mengidentifikasinya sebagai prioritas utama bagi kesehatan global (Ruvani, 2022).

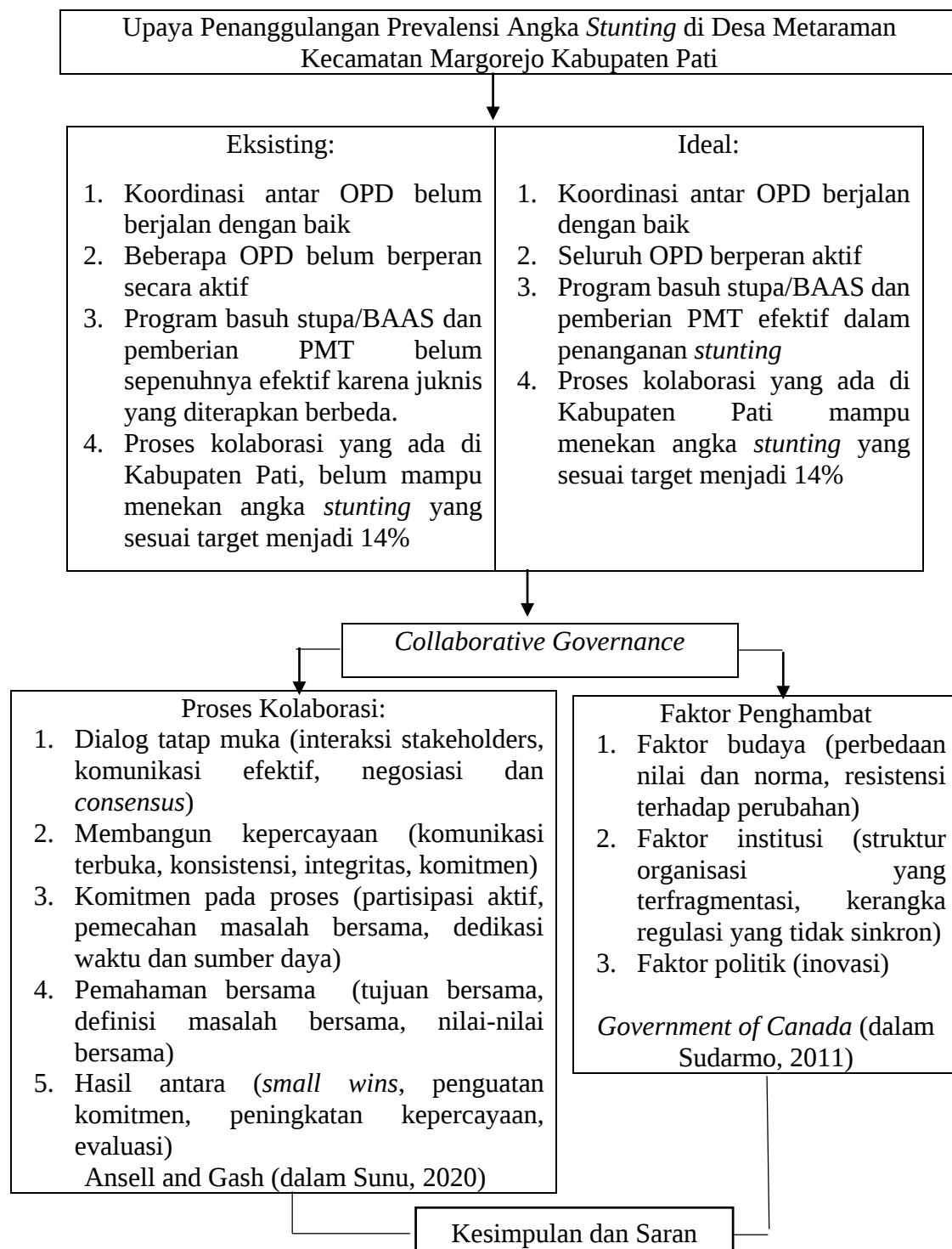
Penurunan *stunting* menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan). Keempat faktor tersebut mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap keempat faktor tersebut diharapkan dapat mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi (Bappenas, 2018).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi *stunting* melalui pendekatan multisektor yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Kebijakan ini melibatkan intervensi gizi spesifik yang menasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, seperti pemberian makanan tambahan, suplementasi tablet tambah darah (TTD), dan imunisasi, serta intervensi gizi sensitif yang mencakup penyediaan akses air bersih, sanitasi layak, pendidikan, dan layanan kesehatan dasar. Selain itu, Posyandu menjadi ujung tombak dalam pemantauan pertumbuhan anak, pemberian vitamin A, edukasi gizi, dan imunisasi. Desa juga berperan penting

melalui pengalokasian Dana Desa untuk mendukung program pencegahan *stunting* dan pendampingan oleh kader pembangunan manusia (KPM).

1.5.3 Kerangka Berpikir

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir



1.6 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.5 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

Fenomena	Definisi	Sub Fenomena	Operasional
<i>Collaborative governance</i>	Usaha pemerintah dalam mengatasi permasalahan publik dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan entitas swasta lainnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil program atau kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini mencakup dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama, hasil antara	1. Dialog tatap muka	a. Interaksi <i>stakeholders</i> b. Komunikasi efektif c. Negosiasi dan consensus
		2. Membangun kepercayaan	a. Komunikasi terbuka b. Konsistensi dan integritas c. Komitmen yang baik
		3. Komitmen pada proses	a. Partisipasi aktif b. Pemecahan masalah bersama c. Dedikasi waktu dan sumber daya
		4. Pemahaman bersama	a. Tujuan bersama b. Definisi masalah bersama c. Nilai-nilai bersama
		5. Hasil antara	a. <i>Small wins</i> b. Penguatan komitmen c. Peningkatan kepercayaan d. Evaluasi berkala

Faktor-faktor penghambat *collaborative governance* menurut *Government of Canada* Tahun (dalam Sudarmo, 2011) bisa diterapkan untuk mengetahui upaya menanggulangi prevalensi angka *stunting* di Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Terdapat fenomena guna merespon ragam faktor yang menghambat:

1. Faktor budaya

Dalam mengetahui faktor budaya dalam *collaborative governance* pada upaya menanggulangi prevalensi angka *stunting* di Desa Metaraman, peneliti mengamati budaya-budaya yang ada pada *stakeholders* yang terlibat dan bagaimana budaya tersebut membentuk proses-proses yang terjadi dalam kolaborasi.

2. Faktor institusi

Faktor institusi dalam kolaborasi yang terjalin untuk mengetahui apakah lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kolaborasi mengadopsi struktur vertikal atau horizontal. Pemerintahan menyatukan sistem pemerintahan yang sifatnya demokrasi representatif atau dalam kolaborasi ini cenderung memiliki sifat spontanitas. Faktor institusi dapat dilihat dalam keberjalanan proses kolaborasi layaknya usaha penanggulangan prevalensi angka *stunting* di Desa Metaraman, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

3. Faktor politik

Faktor politik yang dimaksud adalah bagaimana seorang pemimpin dalam proses kolaborasi dapat memunculkan inovasi atau ide-ide baru sehingga proses kolaborasi tersebut dapat berjalan dengan baik pun memberi inspirasi kepada agenda yang ditentukan serta mampu ditujukan dalam mewujudkan pencapaian hasil-hasil positif.

1.7 Argumen Penelitian

Dari data yang ada, terlihat bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat upaya penanggulangan prevalensi angka *stunting*. Kesibukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kurangnya koordinasi antar mereka

menjadi salah satu tantangan utama. Selain itu, peran beberapa OPD dalam proses kolaborasi masih belum terlihat secara aktif, dan miskomunikasi dalam proses komunikasi antar OPD juga menjadi kendala. Ketidakefektifan program "basuh stupa" yang diusulkan oleh BAPPERIDA turut menjadi perhatian, terutama karena perbedaan implementasi juknis yang menyulitkan pencapaian tujuan yang diharapkan. Selain itu, optimalisasi penanganan *stunting* secara keseluruhan dan kegagalan dalam menekan angka *stunting* menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang komprehensif dalam menindaklanjuti permasalahan ini. Salah satu langkah penting adalah memastikan terjalinnya proses kolaborasi yang baik antara semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi yang solid dan terkoordinasi, diharapkan akan tercipta sinergi yang efektif dalam menanggulangi masalah *stunting* ini secara holistik dan berkelanjutan. Dengan memperkuat proses kolaborasi antar lembaga dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penanggulangan prevalensi angka *stunting*, akan tercipta landasan yang kuat untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Proses kolaborasi yang solid antar lembaga dapat memungkinkan pertukaran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, beserta pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Namun, untuk mencapai hal ini, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penghambat yang ada.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada pendekatan ilmiah yang diimplementasikan guna mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat yang

khusus. Metode penelitian ini didasarkan pada aspek-aspek ilmiah yang rasional, sistematis, dan berdasarkan pengalaman empiris dalam proses penelitian. Penggunaan metode penelitian dilakukan untuk mengatasi masalah yang spesifik dengan menganalisis data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Pemilihan metode penelitian yang sesuai akan menghasilkan hasil penelitian yang memiliki tingkat validitas ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti mengintegrasikan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan guna memahami dan menjelaskan masalah yang diteliti dengan mengamati fenomena alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci dalam proses penelitian.

Dalam kata-kata yang lebih sederhana, penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada cara peneliti memahami dan menginterpretasikan arti dari peristiwa, interaksi, dan perilaku subjek dalam situasi tertentu melalui perspektif mereka sendiri daripada bagaimana temuan diperoleh melalui prosedur statistik. Fenomena tersebut dapat berupa sesuatu yang ditemui oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, yang kesemuanya dapat direpresentasikan secara verbal dan holistik untuk menggambarkan keadaan sebagaimana adanya (Fadli, 2021). Data dikumpulkan dan dianalisis dengan menerapkan pendekatan kualitatif, yang melibatkan analisis data secara induktif dan kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada pemahaman makna daripada pencapaian generalisasi.

Sehingga dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti bertujuan memberikan gambaran atau menjelaskan permasalahan yang terkait oleh

“*Collaborative Governance* dalam Upaya Penanggulangan Prevalensi Angka *Stunting* di Desa Metaraman, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati”.

1.8.1 Tipe Penelitian

Dari penjelasan sebelumnya, penelitian penulis memanfaatkan pendekatan kualitatif berjenis penelitian yang sifatnya deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif merujuk pada suatu kerangka masalah yang memandu penelitian untuk secara komprehensif, menyeluruh, dan mendalam mengeksplorasi atau menggambarkan situasi sosial yang sedang diteliti. Karenanya, pada penelitiannya penulis berupaya menguraikan sekaligus menilai pola kolaborasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam usaha untuk mengurangi prevalensi angka *stunting* di Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian serupa oleh latar peneliti mencatat kondisi ataupun fenomena sebenarnya atas objek yang dibahas pun menelitinya guna mendapat informasi juga data yang relevan dengan permasalahan yang diajukan. Peneliti mengambil lokus di Kabupaten Pati yang mana termasuk dalam 11 daerah prioritas Provinsi Jawa Tengah. Desa Metaraman sendiri menjadi salah satu lokus *stunting* di Kabupaten Pati pada tahun 2023. Penelitian ini difokuskan pada pengidentifikasian pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan upaya menanggulangi prevalensi angka *stunting* di Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yaitu BAPPERIDA Kabupaten Pati, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Puskesmas Margorejo, Pemerintah Desa Metaraman, serta kader *stunting*.

1.8.3 Subjek Penelitian

Peserta ataupun subjek penelitian ialah individu dengan kapasitas untuk memberi data yang relevan dan signifikan terkait dengan tujuan penelitian ini. Mereka memiliki peran kunci dalam menyediakan informasi terkait keadaan yang berlaku di lokasi penelitian. Peneliti telah menggunakan metode seleksi informan berdasarkan teknik sampling yang cermat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian dalam konteks ini mencakup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Kabupaten Pati, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dinas Sosial Kabupaten Pati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, perangkat Desa Metaraman, Puskesmas Margorejo, serta kader *stunting*.

1.8.4 Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif berikut, berbagai jenis data digunakan, meliputi:

1. Data angka yang merujuk pada informasi dalam format digital seperti persentase, jumlah, frekuensi, pun sebagainya.
2. Data tertulis yang berbentuk penjelasan dalam bentuk teks, misalnya ketetapan, tugas pokok, beserta fungsi.
3. Data gambar di mana termasuk bagan, gambar, peta, symbol, pun sebagainya.
4. Data tabel yaitu susunan informasi berbentuk tabulasi

Peneliti menggabungkan empat jenis data tersebut untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki relevansi dan dapat mempermudah keberhasilan penelitiannya.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian kualitatif, meliputi:

1. Data primer

Merupakan informasi yang didapat secara langsung dari sumber utama, yang sering kali dikumpulkan melalui interaksi wawancara atau tanggapan terhadap kuesioner yang dilaksanakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer didapat atas tahapan wawancara langsung kepada respondennya sebagai informan.

2. Data sekunder

Merupakan informasi yang tidak diberikan langsung kepada peneliti, biasanya berasal dari individu, dokumen, atau publikasi lain. Peneliti juga menghimpun informasi pendukung di ragam rujukan, seperti, berita, artikel, daring, jurnal, buku, serta kajian terdahulu. Data sekunder ini digunakan sebagai data pendukung dan melengkapi hasil penelitian, dengan fokus pada studi pustaka yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber informasi terkait *stunting* serta upaya penanggulangannya di Kabupaten Pati.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini, termasuk:

1. Wawancara

Dalam proses wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada peserta dan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh peserta kemudian dicatat atau direkam menggunakan perekam. Wawancara

bertujuan menggali informasi secara langsung dari sumbernya dan sering digunakan untuk mendalaminya pemahaman peserta tentang objek penelitian.

2. Observasi

Pengamatan ini dapat dilakukan secara langsung dengan melihat langsung ke objek yang diamati atau tidak langsung melalui berbagai alat seperti daftar catatan atau perangkat perekam elektronik. Tujuan dari observasi adalah untuk merasakan, memahami, dan mendapatkan pengetahuan lebih lanjut tentang suatu fenomena berdasarkan pemahaman dan gagasan yang telah ada sebelumnya. Melalui observasi, peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian.

3. Studi Literatur

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang melibatkan proses pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan artikel. Peneliti membaca, mencatat, dan mengelola materi penelitian untuk membangun dasar teoritis, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat menyusun, mengalokasikan, dan mengorganisir beragam literatur yang relevan dengan bidang studi. Melalui studi literatur, mereka mendapat pemahaman secara mendalam dan luas terkait permasalahan yang ingin diteliti.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam metode penelitian yang digunakan, teknik analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Dengan demikian, teknik analisis data kualitatif diterapkan guna mengelola hasil wawancara, observasi, beserta data dokumentasi

dengan cara mengeksplorasi dan menganalisis permasalahan yang teridentifikasi selama penelitian berlangsung.

1.8.8 Kualitas Data

Dalam bukunya "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Sugiyono (2019) menyatakan bahwa kualitas data dapat diartikan keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi data yang dikumpulkan melalui instrumen penelitian. Pendekatan yang diterapkan guna mengevaluasi kualitas data dalam penelitian ini yakni metode triangulasi. Sugiyono (2012: 327) menggambarkan triangulasi sebagai metode pengumpulan data yang melibatkan berbagai sumber dan berbagai teknik pengumpulan data. Adanya perlakuan teknik triangulasi, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memanfaatkan beragam teknik pengumpulan data untuk menguji beserta memverifikasi keakuratan data yang telah terkumpul. Penelitian ini menerapkan dua jenis teknik triangulasi:

1. Triangulasi sumber

Merupakan usaha untuk memverifikasi dan memastikan kevalidan data dengan cara mengevaluasi dan membandingkan informasi yang didapat dari berbagai sumber yang masih relevan pada konteks penelitian.

2. Triangulasi teknik

Merupakan sebuah pendekatan guna mengujikan keakuratan data dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan data yang bervariasi, seperti melakukan wawancara, observasi, juga pencatatan. Kaitannya dengan ini tujuannya guna mengkonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan pendekatan yang berbeda.

Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan data dari sumber yang sama yaitu melalui pengumpulan informasi para pihak pemangku kepentingan yang bersangkutan pada upaya menanggulangi prevalensi angka *stunting* di Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Setelah itu, peneliti menerapkan teknik triangulasi data untuk menguji validitas data yang sudah terkumpul.